

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Abdulhay Marhainis. 1986. *Hukum Perdata Material Jilid III*. Jakarta: PT. Paramita.
- Adrian Sutedi. 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sugono. 2011. *Metodi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harsono Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hasni. 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Ismaya Samun. 2011. *Pengantar Hukum Agraria*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2008. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Komariah. 2002. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang.
- Mohammad Hatta. 1997. *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Mutiara.
- Muhammad Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Citra: Aditya
- P.N.H Simanjutak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

- R. Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakhti.
- Raharjo Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hardjowigeno Sarwono. 2007. *Ilmu Tanah*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hardjowigeno Sarwono dan Widiatmaka. 2007. *Evaluasi Kesesuaian Lahan & Perencanaan Tataguna Lahan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
- Herman Hermit. 2009. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah*. Jakarta: CV. Mandar Maju.
- Santoso Urip. 2010. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Siregar D. Doli. 2008. *Kekayaan Negara Siapa Punya, Siapa Kuasa*. Jakarta: Sinergi Manajemen Aset.
- Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internasa.
- Subekti dan Tjtrosudibi. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Susanto Rachman. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Tanah dan Penerapannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soedharyo Soimin. 2013. *Status Hak dan Pengadaan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.

## **2. Perundang-undangan**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6.2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.03/1994 tentang Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara.
8. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: A.70.PL..09.03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Inter Departemen Pertukaran Tanah Milik Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Seluas 76.000 m<sup>2</sup> di Tangerang.

## **3. Referensi Internet**

1. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/beritamedia/detail/beda-keuangan-negara-kekayaan-negara>
2. <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>
3. [Kemenkeu.go.id/Berita/dirjen-kekayaan-negara-akan-review-kebijakan-pertukaran-aset](https://www.kemenkeu.go.id/Berita/dirjen-kekayaan-negara-akan-review-kebijakan-pertukaran-aset)

4. [www.kopertis12.or.id/2012/12/02/produk-hukum-yang-berkaitan-dengan-barang-milik-negara.html](http://www.kopertis12.or.id/2012/12/02/produk-hukum-yang-berkaitan-dengan-barang-milik-negara.html)
5. <https://www.dikjen.kemenkeu.go.id/beritamedia/detail/beda-keuanganegara-kekayaanegara>.

